

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT
PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 PADA DESA BABAT,
DESA KASMARAN DAN DESA MANGUN JAYA
KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI



Nama : M. Chairul Iman Tono
NIM : 222014490

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 PADA DESA BABAT, DESA KASMARAN DAN DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Akuntansi**



**Nama : M. Chairul Iman Tono
NIM : 222014490**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Babat,
Desa Kasmaran Dan Desa Mangun Jaya Kecamatan
Babat Toman
Nama : M Chairul Iman Tono
NIM : 222014490
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I,

Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., Ak
NIDN : 0228115802/0121961

Pembimbing II,

Saekarini Yuliachtri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN : 0211078301

Mengetahui,
Dekan
Ub. Ketua Studi Akuntansi



Betri sirajudin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106092/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Chairul Iman Tono
Nim : 222014490
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Babat, Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2019



M. Chairul Iman Tono

Abstract

M Chairul Iman Tono / 222014490 / 2019 / An Analysis of Village Financial Management based on Permendagri No. 113 2014 in Babat Village, Kasmaran Village, and Mangun Jaya Village Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

The objective of this study was to find out the causes of village financial management in Babat village, Kasmaran village and Mangun Jaya village which had not met the rule of Permendagri No. 113 of 2014. This research included descriptive. The data used primary and secondary data. The technique of collecting data in the study used interview methods and documentation. The method of analysis used qualitative methods. The results of this study indicated that village financial management in Babat village, Kasmaran village and Mangun Jaya Village Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin was in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. But there were still several stages that had not been done well that were the planning stage of Babat village and Kasmaran village where the village government did not involve the community in the village development meeting. The implementation phase of Kasmaran village did not carry out the planned program, namely the construction of a trail. The reporting phase of the Mangun Jaya Village had not yet carried out the APBDesa reporting in 2018. The stage of accountability of the three villages was the low level of openness or transparency to the community for the realization of the APBDesa implementation.

PENGESAHAN

NO. 433 /Abstract/LB/UMP/viii / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang _____

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb

AlhamdulillahRabbil'alamin segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis bisa menulis skripsi dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Babat, Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada sesosok nabi dan rosul yang teramat di cintai umatnya dan sangat mencintai umatnya beliau adalah sayyidina wasafiina wamaulana Muhammad SAW

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada ke dua orang tua saya tercinta, Bapak saya Sokip dan Mamak saya Yasmi serta Kakak dan Mbak saya yakni Edi Suyanto, Sumiatun, Hadi Supriono, Agus Yasminto dan Siti Jumaroh dan seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pemimbing saya Ibu Hj. Rosalina Ghazali, SE.,Ak.,M.si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA yang telah sangat-sangat sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., Ak., M.Si., CA. dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Fadhil Yamaly, S.E. AK., M.M. Selaku Pembimbing Akademik paket 21 Angkatan 2014
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak kepala desa beserta perangkat dan masyarakat desa Babat, desa Kasmaran dan desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman yang telah membantu untuk menjadi responden dalam penelitian.
7. Terkhusus kepada yang tercinta dan saya banggakan Bapak Sokip dan Mamak Yasmi yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang tulus dan ikhlas
8. Saudara Edi Suyanto, Sumiatun, Hadi Supriono, Agus Yasminto, dan Siti Jumaroh yang senantiasa memberikan doa dan bantuan baik moral maupun materi selama penyusunan skripsi ini
9. Keponakanku Johan dan Daffa, Keisya, Mahariani, dan Jihan, Dafi, Zahra dan Yuda, Fatih, Aisyah, serta yang baru lahir mereka semua yang memacu ku dan bersemangat untuk mengejar skripsi ini agar segera dituntaskan
10. Sahabat Seperjuangan Skripsi ku yang dipertemukan atas seizin Allah SWT Al Syahdad, Dovi Irawan, M. Faisal Siddiq, Muhammad Ardiansyah, Cakra, M. Robianto, Nanda Radufi, Henry Kurniawan, Poni Pebsa Jaya, Indra Agustoni, Ilham Kurniawan, Yudha Bramasta, Jefri Hidayat, Lendra, Rian Anggara, Abi Hurairo, Deni, Wahyu, Wawan terimakasih sudah menemani dalam perjalanan kita yang penuh canda dan tawa serta semangat yang tiada hentinya.

Semoga Allah SWT., membalas budi baik kalian dengan berkah yang melimpah. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan disisi Allah SWT

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2019
Penulis,

M Chairul Iman Tono

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMABAHAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Desa dan Pemerintah Desa	9
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa)	10
3. Pengertian Pengelolaan Dana Desa	13

4. Perencanaan	14
5. Pelaksanaan	16
6. Penatausahaan.....	18
7. Pelaporan	19
8. Pertanggungjawaban.....	20
B. Penelitian Sebelumnya	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Operasional Variabel	27
D. Data Yang Diperlukan	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian.....	31
1. Sejarah Singkat Desa Babat, Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya	31
2. Kondisi Desa Babat, Kasmaran dan Mangun Jaya	32
3. Letak Geografis.....	32
4. Keadaan Ekonomi	33
5. Visi dan Misi Desa Babat, Kasmaran dan Mangun Jaya	34
2. Pembahasan Hasil Penelitian	40

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	66
2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Profil Desa Babat,Kasmaran dan Mangun Jaya	5
Tabel I.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	27
Tabel IV.1 Pelaksanaan Indikator Perencanaan Desa Babat	41
Tabel IV.2 Pelaksanaan Indikator Perencanaan Desa Kasmaran.....	43
Tabel IV.3 Pelaksanaan Indikator Perencanaan Desa Mangun Jaya	44
Tabel IV.4 Pelaksanaan Indikator Pelaksanaan Desa Babat.....	46
Tabel IV.5 Pelaksanaan Indikator Pelaksanaan Desa Kasmaran.....	48
Tabel IV.6 Pelaksanaan Indikator Pelaksanaan Desa Mangun Jaya	49
Tabel IV.7 Pelaksanaan Indikator Penatausahaan Desa Babat	52
Tabel IV.8 Pelaksanaan Indikator Penatausahaan Desa Kasmaran	53
Tabel IV.9 Pelaksanaan Indikator Penatausahaan Desa Mangun Jaya	54
Tabel IV.10 Pelaksanaan Indikator Pelaporan Desa Babat.....	56
Tabel IV.11 Pelaksanaan Indikator Pelaporan Desa Kasmaran.....	57
Tabel IV.12 Pelaksanaan Indikator Pelaporan Desa Mangun Jaya.....	58
TabelIV.2 Pelaksanaan Indikator Pertanggungjawaban Desa Babat	60
TabelIV.2 Pelaksanaan Indikator Pertanggungjawaban Desa Kasmaran	61
TabelIV.2 Pelaksanaan Indikator Pertanggungjawaban Desa Mangun Jaya ..	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa mempunyai keluhuran dan juga kearifan lokal yang luar biasa. Desa dan desa adat atau yang juga disebut dengan nama lain, biasa disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pada pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan juga hak tradisional yang diakui juga dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama seperti menyangkut pada kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut

tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah

Sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dengan diberikan hak kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus kewenangannya tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Desa, pemerintah menetapkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113/2014). Hal ini berarti dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Dengan adanya hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Perencanaan keuangan desa adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membuat sebuah perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan sebuah prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat bendahara desa dalam penatausahaan adalah buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Laporan pertanggungjawaban desa adalah dokumen resmi milik pemerintah desa yang berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan audit dan juga sebagai barang bukti apabila sewaktu-waktu

diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.

Rangkaian dan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan juga dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan seperti pada Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi dan misi desa, masyarakat desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negeri kesatuan republik indonesia (Sujarweni, 2015: 2).

Menurut M. Ridwan Tikollah, (2018) Menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di kecamatan mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan desa dikabupaten Musi Banyuasin ini didasarkan pada sebuah realita bahwa sebagai pilar ekonomi daerah. Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkret dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipasif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat

dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan didesanya dan ikut serta merealisasinya.

Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas Wilayah Kabupaten Mencapai 14.265,96 Km. Untuk Luas wilayah Kecamatan Babat Toman Mencapai 1.523,00 Km dan Kecamatan Babat Toman meliputi 13 desa, adapun penelitian ini dilakukan pada 3 desa.

Tabel I.I
Profil Desa
Desa Babat Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya

No	Keterangan	Babat	Kasmaran	Mangun Jaya
1	Jumlah Warga Desa	1.670	1.450	3.559
2	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	818	691	1.830
	Perempuan	852	769	1.729
3	Pendidikan Terakhir :			
	Tidak Sekolah	239	220	435
	SD	208	236	393
	SMP	109	129	465
	SMA	112	144	202
	Kuliah	28	22	45

Sumber : Peneliti, 2019

Setelah melakukan survey pendahuluan wilayah. Penulis mengetahui bahwa Desa Babat, Kasmaran dan Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin merupakan sebuah desa terbelakang yang jauh dari pusat kota, dimana kondisi jalannya yang masih berupa jalanan tanah serta minimnya jalan yang telah di aspal, ditambah akses internet yang masih buruk dikarenakan sedikitnya sinyal untuk mengakses internet, kebanyakan masyarakat di sana bekerja sebagai seorang petani seperti petani kelapa sawit dan karet. Berikut data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Tabel I.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Desa Babat, Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya

Tahun	Nama Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Desa Babat	541.837.750	531.337.750
2018	Desa Kasmaran	540.537.750	517.637.750
2017	Desa Mangun Jaya	653.037.750	608.071.400

Sumber : Penelitian, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel I.2, menunjukkan dari segi pelaporan di temukan fenomena permasalahan yang tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37 yang berbunyi”. kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Adapun masalah dilapangan desa mangun jaya belum melakukan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun 2018 yang seharusnya kepala desanya sudah menyampaikan laporan petanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun 2018 kepada bupati/walikota.

Fenomena permasalahan juga ditemukan pada pasal 40 yang berbunyi”. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat akan tetapi pada kenyataannya dilapangan desa babat tidak menyediakan sebuah media informasi untuk konsumsi masyarakat seperti halnya sebuah papan pengumuman , banner, dan media-media cetak lainnya yang seharusnya kepala desanya memberikan informasi terkait dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai bahan konsumsi masyarakat.

Adapun masalah pada pembangunan di desa kasmaran yang dimana pemerintah desanya sudah merencanakan suatu program untuk membangun pembangunan Jalan Setapak. Namun pada kenyataannya dilapangan desa kasmaran tidak melaksanakan pembangunan jalan setapak, sedangkan pembangunan jalan setapak sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terlebih lagi pada musim penghujan tiba.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Babat, Desa Kasmaran, Dan Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Babat, Desa Kasmaran dan Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian adalah untuk mengetahui penyebab pengelolaan keuangan desa di Desa Babat, Kasmaran dan Desa Mangun Jaya apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya mengetahui pengelolaan keuangan desa dengan baik

2. Pemerintah Desa Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan pemerintah desa, agar melakukan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 Hal121-137(<http://nmjnn/jurnal.untagd.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254>)
- Hasman Husin Sulumin (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis* Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 Hal 43-53 (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4246/3161>)
- Indra Bastian.2010. *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- M.Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2018 Hal 87-98 (<https://osjtejs.unm.ac.id/JEKPEND.ahdjfsd/article/download/5064/2895>)
- Mimin Yatminiwati (2017).Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2017.Hal 1-10 (<http://ejournal.Stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/5>)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.(2014). Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- V. Wiratna Sujarweni 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Bru Press.